

DAFTAR PUSTAKA

Antriyandarti, Ernoiz. *Mekanisme Metode Ilmiah*. Program Studi Agribisnis, Universitas
Sebelas Maret. SPADA UNS.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang. (2023). *Keputusan DPRD Kota Padang
Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah*. Padang: DPRD Kota Padang.

Fahmi, I. (2015). *Manajemen Kinerja: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). *Penyusunan*. Diakses dari
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/> (tanpa tahun terbit).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2010).
*Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014).
*Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB.

Kementerian PANRB. (2021). *Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

(SAKIP) *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Kementerian PANRB.

Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.

Moeheriono. (2018). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi* (Edisi Revisi). Jakarta: PT

Rajagrafindo Persada.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016. (2016).

Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jakarta: Kemendagri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018. (2018). *Pedoman*

Penyusunan Tata Tertib DPRD. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. (2014). *Sistem*

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Sedarmayant. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan*

Maajemen Kinerja. Bandung: PT Refika Aditama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. (2014). Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

(2014). Jakarta: Sekretariat Negara.